

MITIGASI GEMPA DAN TSUNAMI DI KOTA PADANG

Novia Winda Sari, Susi Sulandari, Dyah Lituhayu
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedharto SH, Kampus Tembalang, Semarang
Email : noviawindasari@gmail.com

Abstract

Recognize that Padang City has a high potency of earthquake and tsunami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) of Padang City is formed as the Coordinator and Implementor of Disaster Management at the local level. The mitigation activities used to reduce the high risk of negative effect of the earthquake and tsunami such as formulate regulations as a reference of mitigation, hazard maps, socialization and simulation, procure The Early Warning System, Determination of earthquake-safe construction, and manufacturing lines and evacuation (shelter). Conservation of coastal forests do not become the main focus of the Government of Padang City.

Mitigation earthquake and tsunami based on principle of coordination in order to deploy and mobilize all the resources that needed to actualize the prevention and preparedness successfully in Padang City. There are some constraints that used to faced are limited funds, the lack of apparatus ability, and the high level of the turn-over of employees. Based on the results of the research, Researcher recommend that the strengthening of cooperation with other parties in order to overcome obstacles in implementing the mitigation of earthquake and tsunami.

Keywords: mitigation, BPBD-PK, earthquake and tsunami

Abstrak

Menyadari Kota Padang adalah daerah rawan gempa dan tsunami, maka terbentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang selaku koordinator dan pelaksana penanggulangan bencana pada tingkat daerah. Berbagai kegiatan mitigasi dilakukan dalam rangka mengurangi resiko negatif akibat gempa dan tsunami, yaitu perumusan berbagai regulasi sebagai acuan mitigasi, peta rawan bencana, sosialisasi dan simulasi, pengadaan Sistem Peringatan Dini, Penetapan Konstruksi aman gempa, dan pembuatan jalur dan tempat evakuasi (shelter). Konservasi hutan pantai tidak menjadi focus utama Pemerintah.

Mitigasi dilakukan dengan prinsip koordinasi agar dapat mengerahkan dan memobilisasi segenap sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan suksesnya pencegahan dan kesiapsiagaan Kota Padang. Kendala yang dihadapi adalah Keterbatasan dana, Kurangnya Kemampuan aparatur, dan tingginya tingkat turn-over pegawai. Berdasarkan hasil penelitian Peneliti merekomendasikan agar penguatan kerjasama dengan pihak lain agar dapat mengatasi kendala dalam menjalankan mitigasi gempa dan tsunami.

Kata Kunci : mitigasi, BPBD-PK, gempa dan tsunami

1. PENDAHULUAN

Banyaknya kejadian gempa di Indonesia dipengaruhi oleh letak Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Oleh sebab itu, banyak daerah khususnya Kota Padang merupakan daerah dengan potensi tinggi gempa dan tsunami.

Padang merupakan daerah yang terletak pada daerah *Megatrast* yaitu, daerah yang tepat berada pada lempeng yang bergeser dan bertumpuk serta menyimpan energi yang kapan saja dapat meledak sehingga diprediksikan akan menimbulkan gempa dan tsunami yang besar. Pemerintah Kota Padang sudah menyadari akan pentingnya Pengelolaan Bencana terutama mitigasi gempa bumi dan tsunami sebagai suatu upaya untuk mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh gempa dan atau tsunami yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Maka berdasarkan Instruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pemerintah Kota Padang kemudian membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Padang dan kemudian pada pertengahan tahun 2012 mengalami penggabungan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan berubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang.

Pada saat gempa 30 September 2009 terjadi gempa yang menimbulkan kerugian dan kerusakan serta korban jiwa yang tidak sedikit. Gempa ini membuat Kota Padang lumpuh, oleh karena itu. Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi maka penting dilakukan upaya mitigasi yang serius. Penelitian ini menggunakan teori mitigasi gempa dan tsunami oleh Radianta Triadmadja dan teori koordinasi oleh Sutarto sebagai prinsip dasar penyelenggaraan mitigasi ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian mitigasi gempa dan tsunami di Kota Padang menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme/*intrepretivisme* atau pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu dengan cara membandingkan gejala yang ditemukan. Sehingga penelitian mitigasi gempa dan tsunami di Kota Padang ini merupakan penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Adapun, lokasi penelitian adalah di Kota Padang dengan tempat pengambilan data utama adalah di BPBD-PK Kota Padang.

Penelitian ini menggunakan *nonprobability* dengan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Pencegahan, Staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD-PK Kota Padang, serta masyarakat Kota Padang.

Setelah informan ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan sumber data dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh

melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Sedangkan data sekunder data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data-data tersebut dapat dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu dokumentasi, wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dan interpretasi data yaitu melalui reduksi data yaitu data yang diperoleh dipilah sesuai dengan kebutuhan, kemudian data yang sudah dipilah disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diberikan informan dengan menggunakan analisis domain. Kualitas atau keabsahan data dapat dilihat dari membandingkan wawancara antara informan satu dengan informan lainnya dan dengan suatu dokumen yang berkaitan, ini merupakan teknik triangulasi sumber.

3. PEMBAHASAN

3.1 Mitigasi Gempa dan Tsunami di Kota Padang

Mitigasi gempa dan tsunami yang dilakukan oleh BPBD-PK Kota Padang menerapkan fungsi Koordinasi sebagai landasan utama Penanggulangan Bencana sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. BPBD-PK Kota Padang selaku Badan yang dibentuk dalam menyelenggarakan Penanggulangan bencana melaksanakan mitigasi dengan prinsip koordinasi yang dilakukan oleh BPBDPK Kota Padang adalah melakukan keselarasan aktivitas SKPD, Instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga Usaha, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana sesuai dengan ketentuan berlaku.

3.1.1 Mitigasi Gempa dan Tsunami Melalui Pendekatan Nonfisik

1) Pembuatan Keputusan ataupun Kebijakan Secara Konsisten

Pembuatan keputusan atau aturan mengenai mitigasi gempa dan tsunami bertujuan agar Pemerintah lebih serius dan konsisten dalam melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan dampak negatif yang timbul akibat gempa dan tsunami. Dalam beberapa regulasi juga disertakan penjelasan mengenai koordinasi dalam mitigasi maupun pada saat tanggap darurat bencana.

Mitigasi gempa dan tsunami mendapatkan perhatian yang cukup besar dari Wali Kota Padang selaku pihak eksekutif. Perhatian yang besar ditandai dengan telah berlakunya berbagai Prostep teknis dalam Penanggulangan Bencana yang menjadi Pedoman BPBD-PK Kota Padang dalam menjalankan tugasnya dan terbukanya Pemerintah Kota Padang terhadap bantuan dan atau Kerjasama yang ditawarkan oleh berbagai pihak.

2) Zonasi (pemetaan) daerah rawan gempa dan tsunami

Pembuatan zonasi atau peta rawan bencana dilakukan agar Pemerintah maupun masyarakat mengetahui daerah rawan hingga daerah aman terhadap suatu bencana

termasuk gempa dan tsunami. Melalui peta ini diharapkan Pemerintah dapat membuat kebijakan dan strategi mengenai pengurangan resiko bencana melalui pemaparan peta tersebut dan untuk masyarakat dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai tingkat kerawanan wilayah tempat mereka tinggal atau beraktivitas.

Kesadaran Pemerintah akan pentingnya peta zonasi ini berbanding terbalik dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat Kota Padang itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Selain itu, jumlah peta zonasi yang baru enam buah di seluruh Kota Padang ditambah dengan kurang besarnya ukuran peta, kondisi letak yang tidak strategis dan tidak terawat menambah ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat kota Padang terhadap peta zonasi ini. Masih adanya kekurangan-kekurangan sebagaimana yang disebutkan tadi disebabkan oleh dua hal. Pertama, pengadaan peta zonasi pada 2010 lalu terkesan kurang mempertimbangkan atau observasi terlebih dahulu terhadap ukuran, warna, dan format peta serta kurangnya observasi terhadap perhitungan kemampuan jarak pandang masyarakat terhadap peta. Upaya penginformasian peta zonasi ini dilakukan melalui media internet dan masyarakat yang ingin tahu dapat mendownload sendiri di website resmi Pemerintah Kota Padang. Sayangnya, belum semua masyarakat yang melek internet. Koordinasi dalam pembuatan peta ini dilakukan BPBD-PK dalam hal pembuatan peta, perbanyak peta, serta penyebarluasan peta dengan berbagai pihak yakni Mercycorps, BNI, perusahaan dan BUMN melalui mekanisme sponsorship.

3) Sosialisasi kepada masyarakat yang rentan gempa dan tsunami

Sosialisasi yang dimaksudkan adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dengan bagaimana gempa dan tsunami, diantaranya adalah pengertian, penyebab terjadinya, ciri-ciri terjadinya tsunami, dampak, serta cara penyelamatan diri dan evakuasi jika terjadi bencana gempa dan atau tsunami (Radianta, 2010 :155). Di Kota Padang Sosialisasi sudah dilakukan beberapa kali oleh BPBDPK kepada masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat yang bekerja baik pegawai kantor ataupun pedagang, supir, tukang ojek, ibu rumah tangga dan lain-lain meski selama ini target sosialisasi adalah pelajar. Selain pertemuan sosialisasi yang memang diadakan dan mengundang masyarakat secara resmi, sosialisasi juga dilakukan BPBDPK bekerja sama dengan berbagai pihak melalui tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, tempat wisata, dan sosialisasi melalui berbagai macam media mulai dari baliho melalui mekanisme *sponsorship* seperti halnya peta rawan bencana, televisi, koran, radio hingga media internet yang dapat dilihat diberbagai *website* resmi Pemerintah Kota Padang.

Di Kota Padang Sosialisasi juga melibatkan kelompok masyarakat yang sengaja dibentuk BPBDK yaitu Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang saat ini sudah terbentuk 104 KSB di masing-masing kelurahan. KSB adalah perpanjangan tangan BPBDK di tingkat kelurahan. Mereka membantu dalam hal menginformasikan terjadinya suatu bencana, mengevakuasi warga, pembantuan penyaluran logistik hingga pendataan korban dan kerusakan. Yang menjadi anggota KSB adalah orang yang secara sukarela mau menjadi relawan, selanjutnya mereka diberikan materi dan pelatihan sehingga dapat menjadi pusat informasi terdekat bagi warga sekitar.

Sosialisasi yang dilakukan di Kota Padang terlihat masih jauh dari apa yang diharapkan. Sosialisasi dilakukan hanya satu atau dua kali dalam setahun dan tentu saja

hanya disatu dan dua tepat itu saja. Kendala utama tentu saja adalah dana yang cukup besar dalam satu kali penyelenggaraan sosialisasi. Masyarakat Kota Padang selaku target sosialisasi secara keseluruhan sangat antusias dalam menerima informasi Pemerintah. Koordinasi dalam sosialisasi dilakukan BPBD-PK dengan KSB, Pihak-pihak lain yang jika diperlukan seperti kalangan mahasiswa, para ahli geografi, geologi, dll.

4) Melakukan latihan-latihan (simulasi) yang menirukan kondisi saat kejadian gempa dan tsunami berlangsung

Simulasi dimaksudkan untuk membangun mental yang tidak mudah panik pada saat terjadinya gempa dan atau tsunami serta memiliki kemampuan untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan yang sebenarnya. Pada simulasi dilakukan reka kejadian yang dibuat mirip dengan keadaan pada saat gempa dan atau tsunami berlangsung dan materi yang telah disosialisasikan pada tahap sosialisasi akan dipraktekkan. Di Kota Padang simulasi juga melibatkan kelompok masyarakat yang sengaja dibentuk BPBDK yaitu Kelompok Siaga Bencana (KSB) seperti halnya sosialisasi. Simulasi di Kota Padang juga telah beberapa kali dilakukan dan mendapat respon yang baik dari pesertanya. Kebanyakan simulasi dilakukan di sekolah-sekolah karena dianggap lebih mudah untuk mengajak pelajar dari pada warga dewasa. Simulasi juga aktif dilakukan dengan melibatkan KSB sebagai peserta maupun pihak pendukung dalam suatu kegiatan simulasi. Kegiatan Simulasi juga diiringi dengan kegiatan Pelatihan yang diikuti oleh warga terutama anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagai upaya kesiapsiagaan dan peningkatan kewaspadaan dalam menghadapi bencana.

Kegiatan biasanya dilakukan oleh BPBDPK dan juga bisa berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak lain seperti LSM atau NGO di Kota Padang. Misalnya, mereka mengadakan acara sendiri dan mengundang BPBDPK sebagai pemateri. Hanya saja seperti halnya sosialisasi, simulasi juga masih sangat jarang pada 2013 hanya dilakukan sebanyak dua kali dan kendalanya tentu saja dana. Diamping itu hambatan yang terjadi lainnya adalah kesulitan mengatur waktu berbagai SKPD untuk dapat ada di hari pelaksanaan simulasi yang dijadwalkan. Sedangkan cuaca juga menjadi pertimbangan namun tidak terlalu berpengaruh banyak karena selama ini belum ada masalah yang ditimbulkan oleh cuaca.

3.1.2 Mitigasi Gempa dan Tsunami Melalui Pendekatan Fisik

A. Non Struktural (Alami)

Mitigasi secara alami ini dilakukan dengan perlindungan daerah pantai menggunakan hutan pinggir pantai atau *green belt*, meski belum bisa mengatasi tsunami namun, hutan yang rapat, lebat dan tinggi akan menyedot banyak energi gelombang sehingga kekuatan gelombang jauh berkurang ketika mencapai rumah penduduk.

Namun, sayang sekali perhatian Pemerintah Kota Padang dalam hal ini BPBDPK Kota Padang belum memprioritaskan hutan pantai. Saat ini berbagai program cenderung lebih kepada pembangunan mitigasi secara buatan. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya pemahaman Birokrat mengenai fungsi hutan pantai atau *green belt* ini diakibatkan oleh latar belakang pendidikan yang jauh berbeda dengan ruang

lingkup pekerjaan yang sekarang. Faktor lain adalah kesulitan menetapkan wilayah konservasi sebab daerah padat Kota Padang berada persis di dekat pantai

B. Struktural (Buatan)

1) Sistem peringatan dini (*Early Warning System*)

Sistem Peringatan Dini Tsunami Kota Padang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2010 bertujuan untuk menyampaikan informasi secara tepat waktu dan efektif melalui lembaga yang ditentukan agar memungkinkan orang-orang yang berada pada suatu daerah bahaya untuk mengambil tindakan. Sistem Peringatan Dini di Kota Padang masih dalam jumlah yang kurang dan dalam kualitas yang jauh dari bagus. Saat ini tersedia 23 (dua puluh tiga) sirine dengan total kebutuhan sirine sekitar 100 (seratus) lebih (setiap 2 Km ada sirine). Dari 23 (dua puluh tiga) sirine yang tersedia itupun 11 (sebelas) unit dalam kondisi baik, 4 (empat) unit dalam kondisi setengah rusak, 8 (delapan) unit rusak. Selama ini pengecekan sirine belum rutin dan tahun ini dicanangkan bahwa pengecekan akan dilakukan pada tanggal 26 setiap bulannya.

Karena jumlah pengadaan yang masih sedikit berakibat juga pada tidak meratanya wilayah pemasangan sirine di Kota Padang. Komplek Labor dan Universitas Negeri Padang yang berada di pinggir laut termasuk wilayah yang tidak memiliki sirine. Mahasiswa dan warga yang tinggal disekitar daerah itu tidak pernah mendengar ada sirine ataupun sekedar mengetahui adanya sirine terpasang disuatu tempat.

2) Pembangunan serta Penetapan Konstruksi yang Aman Gempa

Untuk mencegah korban luka ataupun jiwa akibat reruntuhan bangunan maka setiap bangunan di Kota Padang aturan ini tertuang dalam Program Kampanye Rumah Anti Gempa (RAG) yang diadakan oleh BNPB serta BPBD-PK Kota Padang sebagai penyelenggara pada 2010 yang lalu. Kampanye ini muncul akibat kenyataan yang terjadi pada gempa 30 September 2009 di Kota Padang mayoritas korban yang meninggal ataupun luka bukanlah akibat dari getaran gempa melainkan akibat tertimpa bangunan baik rumah, hotel, sekolah, dll. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat mulai dari tahap yang terkecil maka BNPB bersama BPBD-PK Kota Padang giat mensosialisasikan standar bangunan yang aman gempa melalui berbagai cara melalui penulisan artikel di koran harian serta dialog interaktif di televisi dan radio lokal.

Masyarakat menaruh perhatian terhadap informasi ini, hanya saja pemberian informasi tanpa adanya pengawasan dan bimbingan praktek yang jelas dari Pemerintah menyebabkan kebingungan warga sehingga belum semua orang menerapkan standar konstruksi ini. Pengawasan dan bimbingan yang tidak jelas diakibatkan oleh adanya ketidakmampuan sumber daya aparatur BPBD-PK dalam hal konstruksi disamping itu, belum adanya aturan yang mengikat mengenai kewajiban pemakaian standar konstruksi aman gempa yang diiringi dengan pengawasan dan bimbingan aktif oleh BPBD-PK.

3) Pembuatan Jalur dan Tempat Evakuasi

Jalur evakuasi menjadi acuan kemana masyarakat dapat segera menyelamatkan diri ketika tsunami dikabarkan akan terjadi oleh Pusdalops-PB Kota Padang. Pada keadaan darurat gempa dan atau tsunami masyarakat dapat mengikuti petunjuk jalur

evakuasi yang disediakan Pemerintah untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, sudah pasti jalur evakuasi sekaligus tempat evakuasi warga ini sangat mutlak diperlukan.

Jalur evakuasi di Kota Padang sudah mudah diketahui masyarakat melalui rambu evakuasi berwarna *orange* yang saat ini berjumlah 290 buah yang tersebar diberbagai daerah di Kota Padang. Jumlah ini sudah bisa dikatakan cukup namun, BPBDPK akan tetap mengadakan penambahan lagi pada tahun ini. Pada gempa Mentawai 2010 yang lalu keberadaan rambu-rambu ini terbukti dapat memberikan petunjuk bagi masyarakat untuk segera berlari ke lokasi yang ditentukan meskipun akhirnya tsunami tidak terjadi.

Sementara itu tempat evakuasi di Kota Padang disebut dengan *Shelter*. Terdapat beberapa jenis shelter di berbagai macam bangunan yang direncanakan akan di bangun di Kota padang yaitu Shelter yang terdapat di Universitas-Universitas di daerah rawan, bukit evakuasi tsunami, sekolah shelter, shelter daerah persimpangan dan shelter pemukiman. Masing-masing jenis shelter disesuaikan dengan lokasi dan fungsinya pada saat tidak terjadi bencana dan tentu saja sebagai tempat evakuasi dan pemecah gelombang pada saat tsunami terjadi. Jumlah Shelter yang sudah ada baru berjumlah 7 (tujuh) bangunan. Shelter yang ada masih sangat sedikit karena kurangnya dana yang dimiliki untuk membangun bangunan ini.

4.2 Pemahaman dan kepedulian masyarakat mengenai gempa dan tsunami serta upaya mitigasi gempa dan tsunami oleh BPBDPK Kota Padang

Secara keseluruhan kepedulian masyarakat Kota Padang terhadap kebencanaan sudah sangat baik. Pemahaman mereka juga sudah cukup berkembang kearah yang lebih baik pula dari tahun ke tahunnya meski tingkat pemahaman tetap berbeda antara satu dan yang lain diakibatkan oleh faktor pendidikan. Masyarakat yang peduli cenderung datang dari kaum pelajar dan mahasiswa. Bahkan, dari Informan yang berusia lanjut Peneliti menemukan bahwa tingkat pemahaman terhadap bencana khususnya gempa dan tsunami sudah cukup baik mengingat mereka pernah diberikan materi oleh Pemerintah meskipun hanya di mesjid saja. Selain itu, minat untuk memperoleh atau mencari informasi kebencanaan juga menjadi faktor lain yang menentukan tingkat kepedulian warga Kota Padang.

Pada tingkat karyawan pemahan mereka sudah cukup baik, hanya saja tidak diiringi dengan kepedulian yang tinggi. Mereka tidak pernah menghadiri atau mengikuti keegiatan Pemerintah karena lebih mementingkan pekerjaannya. Dan pemahaman serta kepedulian yang buruk datang dari kaum ibu rumah tangga yang sama sekali tidak mengetahui apa itu gempa dan tsunami dan jika keadaan darurat mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh tetangga sekitarnya. Ketidakpedulian juga Peneliti temukan pada bapak-bapak yang bekerja sebagai supir angkot, tukang ojek dan lain-lain dengan alasan yang sama. Meskipun ada juga masyarakat yang tidak memahami dan kurang peduli namun, Peneliti menarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan masyarakat Kota Padang adalah masyarakat yang memiliki ketertarikan yang tinggi untuk mengetahui kebencanaan.

4.3 Kendala BPBDPK Kota Padang dalam melakukan mitigasi gempa dan tsunami di Kota Padang.

1. Keterbatasan Dana

Pelaksanaan mitigasi gempa dan tsunami di Kota Padang pada segala tindakan dan tahapannya sangat membutuhkan dana yang banyak. Untuk melaksanakan segala kegiatan mitigasinya BPBDPK Kota Padang membutuhkan dana sekitar Rp. 5 triliun sedangkan, anggaran APBD untuk seluruh kegiatan dan pengoperasionalan BPBDPK adalah sekitar Rp 2 Miliar termasuk biaya pegawai, dan segala kegiatan penyelenggaraan berbagai bencana yang berpotensi di Kota Padang serta operasional lainnya. Dan khusus untuk Mitigasi gempa dan tsunami tahun 2013 hanya mendapat dana sekitar Rp. 200.000.000,-.

BPBD-PK Kota Padang tidak memungkiri bahwa upaya mitigasi telah dilakukan namun belum maksimal seperti, masih jarang dan tidak meratanya kegiatan sosialisasi yang hanya dapat diadakan beberapa kali saja dalam setahun termasuk peta zonasi, baliho, pamflet maupun leaflet dan simulasi yang dilakukan. Jumlah Zonasi yang hanya tersedia enam unit dan dengan keadaan yang tidak terawat, masih sedikitnya ketersediaan dan masih kurang terawatnya Sirine peringatan tsunami, dan pembangunan shelter yang saat ini masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan.

Untuk mengatasi hal ini maka dalam segala kegiatan seperti sosialisasi, simulasi, hingga pengadaan shelter BPBD-PK Kota Padang terbuka terhadap bantuan atau kerjasama dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri yang menaruh simpati dan perhatian terhadap potensi dan ancaman gempa dan tsunami di Kota Padang.

2. Sumber Daya Aparatur

Saat ini, melalui tuntutan pengelolaan bencana yang semakin menjadi perhatian Pemerintah mulai dari Pusat hingga daerah, maka BPBDPK membutuhkan Ahli Geografi, Ahli Geologi, Ahli Konstruksi, Ahli Tata Ruang Wilayah, Ahli Teknologi dan Informasi serta Para Ahli Pembuat dan Pelaksana Keputusan. yang dapat mendukung pelaksanaan mitigasi. Sementara latar belakang pendidikan pegawai beragam diantaranya sosial politik, ekonomi manajemen, hukum, IPDN dan hampir tidak ada aparatur yang berlatar belakang pendidikan teknis seperti insinyur atau ilmu alam, dan ahli komunikasi.

Dalam mengatasi keterbatasan dan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur BPBD-PK Kota Padang dalam hal pengelolaan kebencanaan maka diadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Peningkatan kapasitas ini dilakukan baik berupa pelatihan mandiri oleh BPBD-PK Kota Padang, kerjasama dengan pihak lain terutama dalam aspek teknik dan sains, pelatihan kemampuan di lapangan serta berbagai bentuk upaya peningkatan kapasitas lainnya dan dapat diadakan oleh BPBD-PK Kota Padang sendiri, BPBD Provinsi, BNPB, LSM, NGO atau pihak Internasional lainnya.

3. Turnover Pegawai

Kegiatan mitigasi merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan melibatkan banyak pihak termasuk pihak luar negeri jadi idealnya butuh staff yang menguasai dan

mengikuti setiap perkembangannya agar menjaga bentuk profesionalisme dan wibawa Pemerintah Kota Padang dihadapan pihak asing. Penyebab dari *turn-over* selama ini diantaranya adalah promosi dan mutasi atau rotasi jabatan. Selain hal tersebut jika terjadi *turn-over* maka seringkali pegawai tidak mengetahui apa saja penyebabnya karena itu adalah wewenang eksekutif selaku pemegang kuasa tertinggi.

Dari temuan lapangan Peneliti *Turnover* atau pertukaran pegawai yang sering terjadi cenderung merupakan kendala pekerjaan yang dilakukan termasuk dalam mitigasi gempa dan tsunami. Hal ini jika terus-menerus berlanjut ditakutkan akan menyebabkan penurunan kualitas kinerja pegawai akibat kebingungan dan ketidaknyaman terhadap pekerjaannya. Padahal, *Turn-over* dapat membuat dana yang digunakan untuk pelatihan pegawai menjadi sia-sia karena ilmu yang didapat tidak dapat digunakan untuk memaksimalkan pekerjaan dan harus pindah ketempat baru. Pertukaran pegawai memang bukan menjadi wewenang dari para pegawai BPBD-PK Kota Padang oleh karena itu, untuk menyasiasi hal ini maka, setiap pegawai yang baru ditempatkan dalam suatu posisi harus cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan maupun dengan pekerjaannya.

3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Mitigasi Nonfisik sudah dilakukan dengan cukup baik. Pembuatan serangkaian regulasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang yang menandakan bahwa Kota Padang telah siap menghadapi gempa dan atau tsunami. Tidak ada kendala yang berarti dalam hal kebijakan karena Pemko Padang dalam hal ini BPBD-PK Kota Padang sangat memprioritaskan mitigasi gempa dan tsunami meskipun, Pihak Legislatif cenderung masih sedikit tanggap sehingga Perda Penanggulangan bencana belum juga rampung hingga saat ini. Peta yang ada sudah cukup baik namun, belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal kebencanaan. Mencakup diantaranya pengertian, ciri-ciri, dampak dan upaya penyelamatan yang dilakukan. Sosialisasi sejauh ini berjalan baik hanya saja masih belum menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi. Pelatihan dalam bentuk simulasi kepada masyarakat yang rentan gempa dan tsunami. Dalam hal ini dilakukan dengan pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) dimasing-masing kelurahan sebagai relawan dan perpanjangan tangan BPBDPK ditingkat kelurahan. Selain itu, simulasi dilakukan pada pelajar dan mahasiswa dan cukup sulit dilakukan pada masyarakat yang bekerja.
2. Mitigasi Gempa dan Tsunami Melalui Pendekatan Fisik yang dilakukan dengan tindakan alami belum mendapat perhatian Pemerintah. Sementara tindakan buatan (struktural) merupakan upaya yang paling sulit untuk disukseskan dalam waktu singkat karena Sistem peringatan dini dan jalur serta tempat evakuasi belum maksimal karena terbatasnya ketersediaan dana. Sementara Konstruksi aman mulai dikampanyekan dan mulai dilaksanakan masyarakat meski belum maksimal. Pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan secara keseluruhan sudah bagus namun program Pemerintah dianggap belum menjangkau seluruh masyarakat termasuk masyarakat pinggir pantai yang merupakan sasaran utama dari setiap kebijakan dan keputusan yang dilakukan.
3. Segala tindakan mitigasi gempa dan tsunami dilakukan berdasarkan prinsip koordinasi artinya, BPBD-PK melakukan keselarasan terhadap seluruh satuan

kerja perangkat daerah yang terlibat dalam penanggulangan bencana, serta koordinasi dengan BUMN/BUMD, LSM / NGO serta pihak swasta dalam penyelenggaraan mitigasi yang lebih efektif dan efisien.

4. Hambatan dalam melaksanakan mitigasi gempa dan tsunami adalah Sumber daya finansial menjadi kendala utama karena perencanaan pada tahap perumusan kebijakan sudah bagus namun, karena dana yang tidak mencukupi maka berbagai kegiatan yang telah direncanakan menjadi terhambat atau malah belum dapat dilaksanakan. Sumber daya aparatur menjadi suatu kendala diakibatkan karena kebanyakan aparatur BPBDPK tidak ada yang berlatar belakang pendidikan yang menguasai kebencanaan dan ilmu manajemen bencana. Kemudian, *Turnover* pegawai yang terbilang cukup tinggi menyebabkan pelaksanaan program menjadi lebih lama dari biasanya. Hal ini juga dikhawatirkan mengganggu koordinasi dan memperlambat pencapaian tujuan. Untuk mengatasi ini aparatur dituntut harus memiliki kemampuan adaptasi dan pemahaman ruang lingkup pekerjaan dengan cepat.

Berdasarkan hasil tersebut maka Peneliti memberikan rekomendasi :

1. Pada Upaya mitigasi secara alami yaitu peningkatan konservasi hutan pantai belum menjadi perhatian Pemerintah. Peningkatan konservasi ini perlu sekiranya dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mitigasi gempa dan tsunami secara alami di Kota Padang.
2. Dalam mengatasi hal ini maka BPBDPK harus lebih memanfaatkan pihak ketiga yang banyak menaruh perhatian terhadap gempa dan tsunami di Kota Padang seperti LSM atau NGO Nasional maupun Internasional yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Untuk itu regulasi, Koordinasi, aturan dan SOP -nya harus jelas bahkan jika perlu sebaiknya dirumuskan kebijakan yang mengatur tegas mengenai hal ini sehingga lebih melegakan Pemerintah Kota Padang dan pihak pemberi bantuan terhadap berbagai kecemasan yang ditakutkan terjadi dikemudian hari.
3. Kekurangan aparatur yang ahli dalam bidang pengelolaan bencana memang menjadi suatu masalah tersendiri. Namun, peningkatan kemampuan melalui pendidikan atau pelatihan mungkin menjadi alternatif yang bisa dilakukan dengan lebih optimal agar pencapaian tujuan yaitu upaya mitigasi yang efektif dan efisien.
4. *Turnover* pegawai yang tinggi memang menjadi hambatan yang diluar kendali BPBDPK sendiri untuk mengaturnya. Oleh karena itu, peningkatan kecepatan penyesuaian diri pemahaman tugas pokok dan fungsi seorang pegawai haruslah lebih ditingkatkan. Disamping itu, pada jajaran eksekutif yang berkuasa yang tentunya menghendaki berhasilnya upaya mitigasi gempa dan tsunami yang telah direncanakan dengan matang maka seharusnya para pejabat eksekutif menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya. Jika pada suatu keadaan suatu posisi ditempatkan oleh orang yang bukan menguasai pekerjaan barunya maka, seharusnya diberikan masa jabatan minimal sehingga seorang pegawai tersebut memiliki waktu dan dapat memaksimalkan pekerjaannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Kodoatie, Robert. J & Roestam Sjarief. 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Keban, T. Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gravamedia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Priambodo, Arie. S. 2009. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana: Badai, Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Kerusuhan Massal, Teror Bom, Kebakaran, Polusi Lingkungan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Purnomo, Hadi dan Roni Sugiantoro. 2010. *Manajemen Bencana Respon dan Tindakan terhadap Bencana*. Yogyakarta : Medpress.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Sutarto. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Triatmadja, Radiana. 2010. *Tsunami Kejadian, Penjalaran, Daya Rusak dan Mitigasinya*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pers.
- Yulaelawati, Ella dan Usman Syihab. 2008. *Mencerdasi Bencana: Banjir, Tanah Longsor, Tsunami, Gempa Bumi, Gunung Api, Kebakaran*. Jakarta : Grasindo.

Penelitian dan Jurnal ;

- _____. 2012. *Masterplan Pengurangan Resiko Bencana Tsunami*. BNPB.
www.bnpb.go.id. Diakses tanggal 2 April 2014
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2010. *Paket Informasi Rumah Aman Gempa Buku Pedoman Peringatan Dini Tsunami Kota Padang*.

Internet ;

- Peta Ancaman Tsunami.. http://geospasial.bnpb.go.id/wp-content/uploads/2011/02/2011-02_18_Peta_Ancaman_Tsunami.pdf. Diakses pada tanggal 10 November 2012.
- Peta Jalur Evakuasi Tsunami Padang. <http://balai2.com/peta-jalur-evakuasi-tsunami-padang/>. Diakses pada tanggal 10 November 2012.

Regulasi ;

- Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang
- Peraturan Walikota Padang No. 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Peanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.